



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG  
ANALISA STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu ada analisa standar belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.**

#### Pasal 1

Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Analisa Standar Belanja bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

#### Pasal 3

Analisa Standar Belanja mencakup pengaturan mengenai:

- a. kewajaran beban kerja;
- b. kewajaran biaya setiap kegiatan;
- c. dan proporsi obyek belanja.

#### Pasal 4

Jenis kegiatan yang telah dianggarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menggunakan Analisa Standar Belanja sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Proses pengendalian dan verifikasi Analisa Standar Belanja kegiatan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 25 Oktober 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

MUHAMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 44



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
ANALISA STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

**KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM .....	2
C. DEFINISI DAN MANFAAT ANALISIS STANDAR BELANJA .....	3
D. TUJUAN PENGEMBANGAN ASB .....	7
BAB II METODE PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA .....	9
A. KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN ASB .....	9
B. TAHAPAN PENYUSUNAN ASB .....	9
BAB III DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA .....	11
A. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBINAAN PEGAWAI .....	11
B. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PELATIHAN NON-PEGAWAI ....	13
C. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PELATIHAN / BINTEK / WORKSHOP APARATUR / PEGAWAI.....	16
D. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA MUSRENBANG KECAMATAN / KELURAHAN.....	18
E. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA FASILITASI KEGIATAN.....	21
F. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA SOSIALISASI.....	36
G. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN.....	38
H. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN JALAN .....	43
BAB IV PENUTUP .....	57

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya. Pada Tahun 2006 dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Penghitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Magelang pernah menyusun Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Standar Analisa Belanja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan waktu terbitlah Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58 tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi-regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan ASB, tetapi ternyata regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB. Akibatnya, ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Mengacu pada definisi di atas, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan *outputnya*. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat secara operasional pada saat setiap SKPD mengajukan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam Pasal 93 ayat (1) sampai (3) Permendagri No. 13 tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa "Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam

pencapaian keluaran dan hasil tersebut.” Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja, pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Sehubungan dengan hal tersebut mendasarkan pada perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pemerintah Kota Magelang bermaksud menyempurnakan kembali Peraturan Walikota Magelang tentang Analisis Standar Belanja yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam mengukur kinerja keuangan dalam APBD dengan pendekatan kinerja.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, *analisis standar belanja*, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat 3, “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, *analisis standar belanja*, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, *analisis standar belanja* dan standar satuan harga”.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 : (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, *analisis standar belanja*, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal; (2) *Analisis standar belanja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 "Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD".
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : "Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 : "Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, (Romawi III) Kebijakan Penyusunan APBD huruf b Belanja Langsung : " Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keperpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan Anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD.

### **C. DEFINISI DAN MANFAAT ANALISIS STANDAR BELANJA**

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen kegiatan yang dikembangkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan

pendekatan kinerja. Sesuai PP 58 Tahun 2005, yang dimaksud dengan Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

### **POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

ASB memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

#### **1. Tahap Perencanaan**

ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapat dipergunakan pada saat menjaring aspirasi pada pelaksana musrenbang, penyusunan rencana kerja jangka panjang, menengah dan pendek (renja), dan pada saat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap tersebut ASB digunakan untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

#### **2. Tahap Penganggaran**

ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan.

ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap SKPD menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB.

#### **c. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan**

Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan / kerugian negara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB maka disebut pemborosan.

## **PERILAKU BELANJA**

Sebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukan informasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu perlu diketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah (misalnya, jumlah peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis).

Besar-kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas pemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanja tetap dan belanja semi variabel dan atau belanja semi tetap. Berikut ini penjelasan masing-masing jenis belanja tersebut.

### **1. *Belanja Variabel***

Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Besar-kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja. Contoh jenis belanja ini antara lain belanja sewa stand per meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya.

### **2. *Belanja Tetap***

Belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas (*range of capacity*) tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contoh belanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Jarak kapasitas adalah serangkaian tingkat target kinerja pemerintah daerah yang dapat dicapai tanpa menambah kapasitas. Misalnya, berdasarkan contoh di atas jarak kapasitas atau sering pula disebut jarak relevan adalah beban kerja melatih dengan jumlah peserta antara nol peserta sampai 50 peserta. Jika pemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis dengan peserta sampai dengan 50 orang, maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Berapapun jumlah peserta, selama berada pada rentang kapasitas antara 1 sampai 50 orang maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Namun, jika peserta melebihi rentang kapasitas, misalnya 60 orang, maka belanja honor panitia akan

lebih dari X rupiah karena pemerintah daerah harus menambah jumlah panitia.

### **3. Belanja Semi Variabel**

Belanja Semi Variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabel ini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel.

#### **POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJA**

Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja pemerintah daerah ada 3 macam pola yaitu :

- A. Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap).
- B. Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel).
- C. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel).

Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, pemerintah daerah harus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan belanja variabel. Dengan kata lain belanja yang dipisahkan tersebut merupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap. Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja

kegiatan pemerintah daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut:

#### **Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel Total**

Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan perkataan lain belanja variabel total merupakan hasil perkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan. Dengan demikian fungsi belanja tersebut di atas dapat pula dinyatakan sebagai berikut :

Belanja Total = belanja tetap total + belanja variabel per unit x target kinerja kegiatan

Jika,

Belanja Total	Dinyatakan dengan simbol Y
Target kinerja Kegiatan	Dinyatakan dengan simbol X
Belanja Tetap Total	Dinyatakan dengan simbol a
Belanja Variabel Per unit	Dinyatakan dengan simbol b

Maka fungsi belanja tersebut dapat diformulasikan sebagai  $Y = a + b.X$

#### **D. TUJUAN PENGEMBANGAN ASB**

Anggaran berbasis Kinerja menghubungkan pengeluaran dana (input) dengan hasil yang diinginkan (output). Pada saat proses penyusunan anggaran, pemerintah dalam hal ini SKPD sudah harus menghitung dan memperkirakan keluaran dan hasil dari tiap-tiap program dan kegiatan yang dibuatnya sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya kegiatan tersebut. Maksud penetapan target pencapaian pada saat penyusunan anggaran adalah agar pengeluaran dana yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Konsep penganggaran berbasis kinerja yang memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat disebut sebagai value for money (VFM). Konsep value for money mempunyai prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif (3E) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) termasuk adanya pertanggungjawaban daripada pengambil keputusan dan pelaksana kegiatan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada saat penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itulah peran ASB sangat penting bagi para pengambil keputusan, pelaksana kegiatan, pengelola keuangan maupun pemeriksa administrasi penggunaan / pengelola kegiatan dalam mengambil keputusan karena bisa dijadikan sebagai pedoman maupun alat ukur . ASB sangat strategis dan penting untuk dapat diterapkan lagi dan dikembangkan di Pemerintahan Kabupaten Wonosobo karena :

1. ASB dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan suatu kegiatan yang sama / sejenis/ serumpun agar lebih adil dan proporsional sehingga setiap unit kerja/SKPD yang mengusulkan kegiatan-kegiatan tersebut akan mendapat perlakuan yang sama dalam penganggaran
2. ASB dapat digunakan untuk menilai kewajaran / kelayakan suatu kegiatan untuk dapat dipenuhi anggarannya dan dilaksanakan. Pengampu Kebijakan / Pengambil Keputusan / TAPD dapat menggunakan ASB ini untuk menilai sekaligus untuk menentukan apakah suatu kegiatan layak untuk diberi anggarannya karena wajar dalam perhitungan /

perencanaannya. Bila suatu kegiatan memang wajib / harus dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja / SKPD akan tetapi penganggarannya tidak wajar maka Pengampu Kebijakan / Pengambil Keputusan / TAPD dapat menyarankan untuk diadakan perubahan anggaran agar menjadi lebih wajar.

3. ASB dapat digunakan untuk menjamin / memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang ekonomis, efektif dan efisien sehingga dapat membawa manfaat bagi pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya dalam bidang pengelolaan dan penyusunan anggaran agar lebih tepat, cepat, cermat dan akurat.
4. ASB dapat digunakan oleh pemeriksa untuk mengecek (menilai kewajaran) suatu kegiatan pada saat diadakan pemeriksaan administrasi kegiatan sehingga bisa diketahui apakah suatu kegiatan itu termasuk kategori efisien, efektif dan ekonomis atau sebaliknya.

**BAB II**  
**METODE PENGEMBANGAN**  
**ANALISIS STANDAR BELANJA**

**A. KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN ASB**

Kerangka konseptual dalam penyusunan ASB adalah sebagai berikut :

1. Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Asumsi ini menandakan bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula anggarannya.
2. 'Standar' adalah instrumen yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang.
3. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokrasi (*bukan otoriter*). Yang dimaksud dengan demokrasi adalah, semua aspirasi SKPD 'didengar' dan 'dipertimbangkan' dalam kapasitas yang sama.
4. Data DPA SKPD dianggap benar dan valid, karena DPA merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Lebih jauh lagi DPA memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berupa perda dan telah dimasukkan ke dalam lembar daerah.

**B. TAHAPAN PENYUSUNAN ASB**

Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

**1. Tahap Pengumpulan Data**

Pada Tahap ini , kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di Pemerintah Daerah. Dalam tahap pengumpulan data ini, semua data (populasi) SKPD harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi asumsi dasar penyusunan ASB yaitu demokrasi. Sangat disarankan agar tidak menggunakan sampling karena sampling tidak memenuhi asumsi 'demokrasi'. Jika disebuah pemda terdapat 1.000 kegiatan, maka data-base nya pun akan berisi 1.000 kegiatan.

**2. Tahap Penyetaraan Kegiatan**

Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan pada golongan/kelompok yang sama. Contohnya adalah kegiatan bimbingan teknis, pelatihan teknis, TOT (Training Of Trainer) adalah kelompok kegiatan yang mirip dan bobot pekerjaannya

sama yaitu 'Pelatihan/Bimbingan Teknis'. Contoh lain adalah pameran, expo, ekshibisi adalah kegiatan yang setara pula yaitu 'Pameran'. Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar yang pertama, yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

### **3. Tahap Pembentukan Model**

Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu:

#### **a. Pencarian Pengendali Belanja (*cost driver*) dari tiap-tiap jenis kegiatan.**

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. *Cost Driver* ada 2 macam yaitu : *cost driver nyata (riil)* dan *cost driver semu (*pseudo*)*. *Cost Driver semu* adalah *cost driver* yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar 'pembenar' untuk memperbesar anggaran. Contoh *Cost Driver Semu* pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis adalah '*tempat pelaksanaan*', seringkali '*tempat pelaksanaan*' misalnya hotel bintang lima dijadikan alasan pembenar oleh pengusul anggaran.

Contoh *Cost Driver Riil* pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis, adalah '*jumlah peserta*' dan '*jumlah hari pelaksanaan*'. Tentunya *cost driver riil* inilah yang akan dipilih dalam pembentukan model. *Cost driver semu* tetap akan diakomodasi dalam bentuk rentang batas atas dan batas bawah pada saat mendistribusikan belanja total.

#### **b. Pencarian Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja Variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.**

Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya.

**BAB III**  
**DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA**

**A. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBINAAN PEGAWAI**

**Deskripsi:**

Pembinaan Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan pembinaan teknis atau non-teknis atau keagamaan dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah Pegawai yang dibina, Durasi pembinaan dalam bulan.

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp 195.000,00 per Jumlah pegawai yang dibina per Durasi pembinaan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Variabel = Rp 195.000,00 x Jumlah peserta yang dibina x Durasi pembinaan

**Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja :**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	3,33%	1,90%	6,09%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,44%	0,00%	5,82%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	5,54%	2,49%	11,00%
4	Belanja Jasa Kantor	20,82%	7,00%	52,18%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	11,36%	2,94%	23,00%
6	Belanja Sewa	5,26%	2,50%	10,00%
7	Belanja Makan & Minum	12,26%	4,94%	27,84%
8	Belanja Perjalanan Dinas	8,24%	2,00%	16,22%
	Jumlah		100%	

**Catatan :**

- Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Tenaga Ahli/Narasumber, dan pemberian penghargaan / hadiah. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Tenaga Ahli/Narasumber, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci memperhatikan asas kebutuhan, keadilan dan kepatutan dengan persetujuan TAPD.

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	20 Orang	450 Orang
Durasi Pembinaan Dalam Hari	1 Hari	3 Hari

**Contoh Kegiatan ASB Pembinaan Pegawai :**

<b>No</b>	<b>SKPD</b>	<b>Kegiatan</b>
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
		Pembinaan Dewan Pendidikan
		Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah
2	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pembinaan Poskestren (Pajak Rokok)
		Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Sanitasi di Tempat Umum (Pajak Rokok)
		Pembinaan Pengobatan Tradisional (Pajak Rokok)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
		Fasilitasi Pembinaan BPSPAM
4	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan	Pembinaan Andong Dokar dan Juru Parkir
5	Kantor Kesbangpol	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila
		Pembinaan Politik bagi Pemuda
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin
		Bimbingan dan Pembinaan Lanjut Usia Potensial
		Pembinaan dan Pelayanan Adopsi Anak
		Pembinaan dan Fasilitasi LKS/LKSA/Orsos yang bergerak di Bidang UKS
		Penertiban dan Pembinaan Tuna Sosial
7	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Tramigrasi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Pembinaan Keluarga Berencana
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
11	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	Bintek dan Pembinaan Kearsipan
		Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
12	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Pembinaan POKDARWIS
13	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Pembinaan Produk Hewan Yang Asuh dan Berdaya Saing
14	Dinas Perdagangan, Koperas, Ukm	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

No	SKPD	Kegiatan
15	Sekretariat Daerah	Workshop Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		Pembinaan Jasa Konstruksi
		Fasilitasi Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro/LKM
		Fasilitasi Pembinaan BPR/BKK
17	Kecamatan Wonosobo	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa
		Pembinaan dan Pelatihan Fungsi Lembaga Masyarakat Pemerintah Desa
		Pembinaan Pendampingan Organisasi Masyarakat
18	Kecamatan Kertek	Penanggulangan dan Pembinaan Kenakalan Anak, Remaja dan Pelajar
19	Kecamatan Selomerto	Pembinaan Karang Taruna
20	Kecamatan Watumalang	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa
21	Kecamatan Kalikajar	Fasilitasi Pembinaan Kepemudaan
22	Kecamatan Sapuran	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa
23	Kecamatan Wadaslintang	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa
24	Kecamatan Sukoharjo	Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan
25	Kecamatan Kalibawang	Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan
		Pembinaan Organisasi Kepemudaan

## B. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PELATIHAN NON-PEGAWAI

### Deskripsi:

Pelatihan Non-Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

### Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

### Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 187.500,00 per peserta pelatihan, per hari pelatihan

### Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Variabel = Rp 187.500,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan

**Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	2,83%	1,00%	6,40%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	4,65%	0,00%	10,20%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	17,26%	3,20%	34,27%
4	Belanja Jasa Kantor	32,79%	1,50%	66,67%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	15,46%	5,43%	24,08%
6	Belanja Sewa	4,93%	0,00%	9,47%
7	Belanja Makan & Minum	36,48%	15,00%	54,57%
8	Belanja Perjalanan Dinas	9,64%	3,00%	20,00%
	Jumlah		100,00%	

**Catatan :**

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Tenaga Ahli/Narasumber, iuran kepesertaan dan belanja Bahan Material dan Pakaian Kerja. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Tenaga Ahli/Narasumber, iuran kepesertaan dan belanja Bahan Material dan Pakaian Kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	20 Orang	280 Orang
Durasi Dalam Hari	1 Hari	45 Hari

**Contoh Kegiatan ASB Pelatihan Non-Pegawai :**

No	SKPD	Kegiatan
1	BPBD	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Siswa Dan Guru Di Daerah Rawan Bencana
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Fasilitasi Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		Fasilitasi Pelatihan Kelompok Masyarakat Aktif
		Pelatihan Skill Bagi Pengelola Organisasi Tingkat RT/RW Di Kab. Wonosobo
		Pelatihan Manajemen Bisnis Bagi Bumdes
3	Disnaker	Pelatihan Keterampilan Dan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin Dan Pekerja Rentan Non Skill
		Pendampingan Pelatihan Keterampilan Dan Kewirausahaan Bagi Eks Buruh Migran Dan Keluarga
		Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pekerja Berbasis Kompetensi
		Pelatihan Perbengkelan
		Pelatihan Tata Boga
		Pelatihan Sablon
		Pelatihan Service HP

No	SKPD	Kegiatan
		Pelatihan Montir Sepeda Motor, Las Dan Komputer Bagi Pemuda Angkatan Pencari Kerja
		Pelatihan Life Skill Bagi Pemuda Putus Sekolah
		Pelatihan Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja Wanita
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Pelatihan Keterampilan Pengelola Kampung KB
		Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
5	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
		Pelatihan Kelompok Budaya
6	Dinas Pertanian	Pelatihan Dan Pengembangan Penangkar Benih Sayuran
		Pelatihan Budidaya Ikan
		Pelatihan Teknis Juru Sembelih Halal
7	Dinas Perdagangan	Pelatihan Laporan Keuangan Bagi UMKM Sesuai SAK E TAP (Standar Keuangan Entas Tanpa Akuntabilitas Publik)
		Pelatihan Kewirausahaan Dan Pemasaran
		Pelatihan Penyusunan Kelayakan Usaha UMKM
		Penguatan Kapasitas Kelompok Pengrajin Batik Wonosobo
8	Kecamatan Wonosobo	Pelatihan Kewirausahaan
		Pelatihan Pembuatan Olahan Makanan
9	Kecamatan Kertek	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
10	Kecamatan Leksono	Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Makanan Dan Asesoris Dari Salak
		Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Makanan Dari Rebung
		Pelatihan Penguatan Pokdarwis
11	Kecamatan Watumalang	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
		Pelatihan Wirausaha Bagi Masyarakat Miskin Pelaku UMKM
12	Kecamatan Garung	Pengembangan Dan Pelatihan Usaha Aneka Boga
13	Kecamatan Kejajar	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
14	Kecamatan Sapuran	Pelatihan Wirausaha Bagi Masyarakat Miskin Pelaku UMKM
		Pelatihan Desain Kemasan Dan Pemasaran Produk-Produk Lokal
		Pelatihan Teknologi Pembuatan Pakan Ternak
		Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
		Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
15	Kecamatan Kepil	Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat

No	SKPD	Kegiatan
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
		Pelatihan Desain Grafis
		Pelatihan Percetakan Digital Dan Sablon
		Pelatihan Jahit Dan Konveksi Kaos
16	Kecamatan Wadaslintang	Pelatihan Wirausaha Masyarakat Miskin

### C. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PELATIHAN / BINTEK / WORKSHOP APARATUR / PEGAWAI

#### Deskripsi:

Pelatihan / Bintek / Workshop Pegawai / Aparatur merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah lainnya, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

#### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

#### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 239.705,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

#### Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Variabel = Rp 239.705,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan

#### Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	4,83%	1,00%	9,40%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	3,20%	0,00%	21,13%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	9,56%	2,30%	22,27%
4	Belanja Jasa Kantor	31,79%	10,50%	68,17%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	15,46%	3,43%	29,08%
6	Belanja Makan & Minum	25,48%	11,00%	54,57%
7	Belanja Perjalanan Dinas	14,64%	4,10%	32,00%
	Jumlah		100,00%	

#### Catatan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja tenaga ahli/narasumber, iuran kepesertaan, belanja bahan material, belanja sewa (hotel dan akomodasi) dan pakaian kerja. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja tenaga ahli/narasumber, iuran kepesertaan dan belanja bahan material dan pakaian kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	10 Orang	300 Orang
Durasi Dalam Hari	1 Hari	14 Hari

**Contoh Kegiatan ASB Pelatihan / BinteK / Workshop Pegawai / Aparatur :**

No	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum
		Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2	Satpol PP	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Leadership training
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
4	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
		Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi
5	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Bimbingan Teknis Bididaya dan Pasca Panen Pisang Secara Baik dan Benar
6	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Ukm	BinteK Pengembangan Desain Kemasan Produk Bagi UMKM
		BinteK Kewirausahaan Bagi Koperasi Pertanian, Kehutanan
7	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	BinteK Pengembangan Capacity Building BUMDes
8	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	BinteK dan Pembinaan Kearsipan
9	Bagian Pemerintahan	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
10	Kecamatan Wonosobo	Pelatihan Linmas Siaga Bencana
		Pembinaan dan Pelatihan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pemerintah Desa
		Pelatihan Kelembagaan Kelurahan dan Pelayanan Umum Masyarakat
		Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Pelatihan pelayanan umum masyarakat
		Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
BinteK Administrasi Kependudukan		
11	Kecamatan Kertek	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

No	SKPD	Kegiatan
		Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
12	Kecamatan Selomerto	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
13	Kecamatan Leksono	Pelatihan Pembentukan Forum KPMD
		Pelatihan RT/RW
14	Kecamatan Watumalang	Pelatihan BUMDes
		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
15	Kecamatan Mojotengah	Pelatihan Bidang Perijinan dan Kependudukan
		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
16	Kecamatan Kejajar	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
17	Kecamatan Sapuran	Pelatihan Pengelolaan Dana Desa Untuk Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
18	Kecamatan Kepil	Pelatihan Pengelolaan DAS Bagi Desa Terdampak Bencana
		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pelatihan Penyusunan APBDes
19	Kecamatan Sukoharjo	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
20	Kecamatan Kalibawang	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
21	Inspektorat	Pendidikan dan Pelatihan Formal

#### **D. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA MUSRENBANG KECAMATAN / KELURAHAN**

##### **Deskripsi:**

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan merupakan kegiatan musyawarah untuk merencanakan dan merumuskan program / kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan.

##### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta

##### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 155.000,00 per Peserta

##### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Rp. 155.000,00 x Jumlah peserta

**Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	12,55%	1,25%	25,20%
2	Belanja Honorarium Non PNS	1,76%	0,00%	3,69%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	9,68%	0,64%	71,18%
4	Belanja Jasa Kantor	37,88%	0,00%	71,84%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	3,46%	0,32%	12,90%
6	Belanja Sewa	1,23%	0,00%	7,22%
7	Belanja Makan & Minum	22,48%	0,68%	55,90%
8	Belanja Perjalanan Dinas	9,97%	3,00%	14,00%
	Jumlah		100,00%	

**Catatan :**

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	50 Orang	200 Orang

**Contoh Kegiatan ASB Musrenbang Kecamatan / Kelurahan :**

No	SKPD	Kegiatan
1	Kecamatan Wonosobo	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
2	Kecamatan Kertek	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
3	Kecamatan Selomerto	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
4	Kecamatan Leksono	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
5	Kecamatan Watumalang	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
6	Kecamatan Mojotengah	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
7	Kecamatan Garung	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
8	Kecamatan Kejajar	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
9	Kecamatan Kalikajar	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
10	Kecamatan Sapuran	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
11	Kecamatan Kepil	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12	Kecamatan Kaliwiro	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
13	Kecamatan Wadaslintang	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
14	Kecamatan Kalibawang	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
15	Kecamatan Sukoharjo	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
16	Kelurahan Wonosobo	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

<b>No</b>	<b>SKPD</b>	<b>Kegiatan</b>
17	Kelurahan Wonosobo Timur	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
18	Kelurahan Jlamprang	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
19	Kelurahan Kejiwan	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
20	Kelurahan Sambek	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
21	Kelurahan Mlipak	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
22	Kelurahan Pagerkukuh	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
23	Kelurahan Rojoimo	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
24	Kelurahan Kramatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
25	Kelurahan Jaraksari	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
26	Kelurahan Bumireso	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
27	Kelurahan Kalianget	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
28	Kelurahan Tawang Sari	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
29	Kelurahan Kertek	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
30	Kelurahan Wringinanom	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
31	Kelurahan Selomerto	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
32	Kelurahan Wonorejo	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
33	Kelurahan Leksono	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
34	Kelurahan Wonorejo	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
35	Kelurahan Kalibeber	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
36	Kelurahan Mudal	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
37	Kelurahan Andongsili	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
38	Kelurahan Garung	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
39	Kelurahan Kejajar	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
40	Kelurahan Kalikajar	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
41	Kelurahan Sapuran	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

## E. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA FASILITASI KEGIATAN

### Deskripsi:

Fasilitasi Kegiatan merupakan kegiatan pemberian bantuan teknis atau non-teknis yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan, pelayanan, pengembangan program tertentu baik di tingkat SKPD maupun di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 185.000,00 per peserta per hari

### Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Variabel

= Rp. 185.000,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari

### Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	22,48%	10,30%	72,20%
2	Belanja Honorarium Non PNS	13,08%	0,00%	58,21%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	14,28%	5,00%	36,46%
4	Belanja Jasa Kantor	27,61%	0,00%	58,20%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	7,38%	3,00%	17,41%
6	Belanja Sewa	12,65%	0,00%	24,30%
7	Belanja Makan & Minum	26,22%	12,10%	72,09%
8	Belanja Perjalanan Dinas	12,30%	7,05%	33,86%
	Jumlah		100,00%	

### Catatan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
2. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	10 Orang	300 Orang
Jumlah Hari	1 Hari	48 Hari

**Contoh Kegiatan Fasilitasi Kegiatan :**

No	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Fasilitasi Apresiasi GTK PAUD Dikmas Berprestasi Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mendongeng Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP/MTs Fasilitasi Model Pembelajaran Di Kelas Rendah dan Kelas Tinggi SD Fasilitasi Pendamping BOS Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Paket C Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kejar Paket A, Paket B, Paket C Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Fasilitasi Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Profesi Guru Fasilitasi Pemilihan PTK Pendidikan Dasar Berprestasi Fasilitasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasilitasi PPDB Online Fasilitasi Kompetisi Siswa, Pendidik dan PTK Fasilitasi Lomba Akademik dan Non Akademik Fasilitasi Penyelenggaraan Gala Siswa Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan Fasilitasi Keolahragaan Pelajar Fasilitasi ASKAB PSSI Wonosobo Fasilitasi PORPROV
2	Dinas Kesehatan	Fasilitasi JAMKESDA Fasilitasi Penerbitan Ijin Fasilitasi Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum Fasilitasi Pembinaan BPSPAM

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah (Pajak Rokok)
		Fasilitasi Penyelenggaraan Gedung Bangunan
		Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan
		Fasilitasi Bankeu
		Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Jalan Kewenangan Kabupaten
		Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
		Fasilitasi Pembangunan Prasarana Sarana Dasar Permukiman Berbasis Komunitas (Fasilitasi Kegiatan KOTAKU, PLBK, PISEW) (Pajak Rokok)
		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
		Fasilitasi Angkutan Gratis Bagi Siswa
		Fasilitasi PAM Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Penyusunan Rapor Ketangguhan Bencana
		Fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops)
		Fasilitasi PAM Tamu/Pejabat (Asing, Pusat, Daerah)
		Fasilitasi PAM Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Operasional Kominda (Komunitas Intelijen Daerah)
		Fasilitasi Forum Komunikasi Masyarakat, Pemuda, Tomas, Toga dan Toda
		Fasilitasi FKUB
		Fasilitasi Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkotika (KAMA) dan Kesatuan aksi Pelajar Anti Narkotika (KAPA)
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Fasilitasi Distribusi RASTRA Fasilitasi pengiriman dan penjemputan ke balai rehabilitasi sosial/RSJ dan Biaya Perawatan di RSU/RSJ Fasilitasi Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi PORSENI Bagi Anak Terlantar
		Fasilitasi kegiatan Hari Disabilitas Internasional
		Fasilitasi Manajemen dan Permodalan Usaha Penyandang Cacat dan Trauma
		Fasilitasi/Bantuan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
		Pembinaan dan Fasilitasi LKS/LKSA/Orsos yang bergerak di Bidang UKS
		Fasilitasi Pengelolaan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial (LK2S) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
		Fasilitasi PSKS (PSM/TKSM/IKPW/TAGANA, dll)
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi TMMD (Bantuan Provinsi)
		Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Posyantekdes
		Fasilitasi Desa Berdikari
		Fasilitasi Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		Fasilitasi Pelatihan Kelompok Masyarakat Aktif
		Fasilitasi Sekolah Lapang Pemberdayaan Masyarakat
		Fasilitasi Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat
		Fasilitasi Pengelola Pasar Desa
		Fasilitasi Pokjantal Posyandu
		Fasilitasi Lomba Desa
		Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa
		Fasilitasi Badan Kerjasama Antar Desa
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
5	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		Fasilitasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

No	SKPD	Kegiatan
		<p>Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten</p> <p>Fasilitasi Penerapan Syarat Kerja Non Diskriminatif</p> <p>Fasilitasi Sertifikasi Standar Mutu Produk</p> <p>Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta</p> <p>Fasilitasi Berdiri dan Berkembangnya Sentra Menjadi Klaster Industri</p> <p>Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM</p> <p>Fasilitasi Kerjasama Dengan Daerah Transmigran Untuk Penambahan Lokasi dan Kuota</p>
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	<p>Fasilitasi Tim Jaga Mutu Pelayanan KB</p> <p>Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB</p> <p>Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)</p> <p>Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan</p> <p>Fasilitasi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Industri Rumah Tangga Bagi Perempuan</p> <p>Fasilitasi Kegiatan Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK)</p>
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	<p>Fasilitasi Operasional lembaga penyiaran publik lokal Radio Pesona FM</p> <p>Gelar Informasi Daerah dan fasilitasi PPID</p> <p>Fasilitasi Hari Pers Nasional</p>
8	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Membaca Cepat
9	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata

No	SKPD	Kegiatan
		<p>Fasilitasi Akses Pasar Bagi Produk Kreatif Melalui Pekan Kreatif dan Festival Kreativitas</p> <p>Fasilitasi Penelitian Cagar Budaya</p> <p>Penyelenggaraan Fasilitasi Seni (Penyuluhan Substansial dan Teknikal, Pemberian Bantuan, Bimbingan Organisasi, Kaderisasi, Promosi, Penerbitan, dan Dokumentasi)</p> <p>Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya</p>
10	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	<p>Fasilitasi Pengembangan Teh Rakyat</p> <p>Fasilitasi Delegasi Legalitas Benih Sumber Cultur Jaringan Kentang</p> <p>Fasilitasi Edukasi Konsumsi Bahan Pangan Asal Hewan Yang Asuh</p> <p>Fasilitasi Pasar Hewan Wonosobo</p>
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm	<p>Fasilitasi Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas</p> <p>Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p> <p>Fasilitasi Legalitas dan Sertifikasi Produk UMKM</p> <p>Fasilitasi Penilaian Kesehatan KSU, LKM, KJKS, KUD dll</p> <p>Fasilitasi Pencetakan Kartu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ijin Pemakaian Kios/Los Pasar</p>
12	Sekretariat Daerah	<p>Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah</p> <p>Fasilitasi Pembentukan BPD</p> <p>Fasilitasi Pemeilihan Kepala Desa</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemerintahan desa</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa</p> <p>Fasilitasi Sekretariat Kerjasama</p> <p>Fasilitasi Program dan Kegiatan Yang Bersumber Dari Anggaran Non APBD Kabupaten</p> <p>Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p>

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi Penyusunan SPP dan SOP
		Fasilitasi Survey Kepuasan Publik
		Fasilitasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM
		Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum
		Fasilitasi Senja Keluarga
		Fasilitasi Silaturahmi Ulama Umaro
		Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat
		Fasilitasi Dewan Masjid Indonesia
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
		Fasilitasi Kegiatan Lomba Keagamaan
		Fasilitasi penyelenggaraan UKS
		Fasilitasi kegiatan KPAD
		Fasilitasi TPKJM
		Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kebencanaan
		Fasilitasi Kegiatan GOPTKI
		Fasilitasi LGN-OTA
		Fasilitasi Komda Lansia
		Fasilitasi BAZNAS Kabupaten Wonosobo
		Fasilitasi Paskibraka Kab. Wonosobo
		Fasilitasi Pemberian Keteladanan dan Prestasi
		Fasilitasi Senam Jumat Pagi
		Fasilitasi Keolahragaan Masyarakat
		Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pentas Seni TMII
		Fasilitasi Marching Band Kab. Wonosobo
		Fasilitasi Paduan Suara Kabupaten
		Fasilitasi Kesenian dan Kebudayaan
		Fasilitasi Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro/LKM

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
		Fasilitasi Dekranasda
		Fasilitasi Pembinaan BPR/BKK
13	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD
		Fasilitasi Tenaga Ahli Fraksi
14	Kecamatan	Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi TKPK Kecamatan
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Intensifikasi PBB
		Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
		Fasilitasi IUMK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi TKPK Kecamatan
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pembentukan BPD
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi IUMK
		Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ternak Sapi
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Lomba MTQ
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pengaduan Keringanan Listrik Untuk Masyarakat
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Kegiatan Gender Point
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
		Fasilitasi Pengisian BPD
		Fasilitasi dan penguatan Kapasitas BUMDES
		Fasilitasi Pendampingan Nominator Lomba Desa, Lomba Sekolah dan K3 Masjid
		Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi TKPK Kecamatan
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Lomba Desa
		Fasilitasi Forum Desa/Kel Siaga Aktif
		Fasilitasi IUMK
		Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ternak Sapi
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi FKDM, Peningkatan Kapasitas SAR dan Patroli Wilayah Tanggap Bencana Alam
		Fasilitasi TKPK Kecamatan
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi IUMK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi Peran FKUB
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kebencanaan
		Fasilitasi TKPK Kecamatan
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Fasilitasi Jambanisasi Desa
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi IUMK
		Fasilitasi Pembinaan Kepemudaan
		Fasilitasi Jambanisasi Desa

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi TKPK Kecamatan
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi IUMK
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi FKUB
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Komda Lansia
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Kemitraan TNI, POLRI, Ormas dan Swasta Dalam Pembangunan Desa
		Fasilitasi IUMK
		Fasilitasi Forum Seni dan Budaya
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
		Fasilitasi Kegiatan BKAD dan BUMDES
		Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi Produktif
		Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa
		Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Penyusunan SPP dan SOP
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pembentukan BPD
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Ujian Perangkat Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI
		Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah
		Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK
		Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan

No	SKPD	Kegiatan
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah Fasilitasi TKPK Kecamatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Potensi Desa
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Fasilitasi Pengelolaan Kemitraan CSR Berkelanjutan Fasilitasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah Fasilitasi Laporan Terintegrasi (LKPJ, LPPD, EKPPD) Fasilitasi FEDEP (Bant. Prov) Fasilitasi Klaster Fasilitasi Carica Day Fasilitasi Agropolitan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Fasilitasi Wisata Edukasi FEDEP (Pajak Rokok) Fasilitasi Perencanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bant. Prov) Fasilitasi Wonosobo Kabupaten Ramah HAM Fasilitasi KHPPIA Fasilitasi Forum Sosial Budaya Fasilitasi Program/Kegiatan Pengembangan Wilayah Fasilitasi Ecodistrict Fasilitasi Kelitbangan dan Pengembangan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) Fasilitasi Penyusunan Roadmap dan Raperda SIDA
16		Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA SKPD
		Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer
		Fasilitasi Gaji Outsourcing PBB-P2
17	Badan Kepegawaian Daerah	Fasilitasi Diklat Teknis
		Fasilitasi Diklat Kepemimpinan
		Fasilitasi Diklat Fungsional
		Fasilitasi Administrasi Kepegawaian
		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan PNS

## F. DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA SOSIALISASI

### Deskripsi:

Fasilitasi Kegiatan merupakan kegiatan pemberian pemahaman dan pembelajaran, penyamaan persepsi terhadap suatu kebijakan atau peraturan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah kepada stakeholder, ASN ataupun masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap suatu kebijakan atau peraturan melalui proses tatap muka maupun penggunaan media atau alat bantu lainnya.

### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 155.825,00 per peserta per hari

### Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Variabel

= Rp. 155.825,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari

### Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	16,48%	1,30%	46,20%
2	Belanja Honorarium Non PNS	9,08%	0,00%	28,21%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	13,32%	5,00%	34,12%
4	Belanja Jasa Kantor	23,11%	0,00%	47,20%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	9,87%	3,00%	21,12%
6	Belanja Sewa	11,45%	0,00%	22,30%
7	Belanja Makan & Minum	25,11%	14,10%	67,09%
8	Belanja Perjalanan Dinas	12,30%	7,05%	33,86%
	Jumlah		100,00%	

### Catatan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

2. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	10 Orang	300 Orang
Jumlah Hari	1 Hari	5 Hari

**Contoh Kegiatan Fasilitasi Kegiatan :**

No	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
		Sosialisasi dan Pengawasan ANDALIN untuk Dunia Usaha
		Sosialisasi Deradikalisasi
		Sosialisasi Undang-Undang Pemilu
2	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Orientasi dan Sosialisasi Bidang Kependudukan
		Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengurusan Perijinan
4	Dinas Pangan ,Pertanian Dan Perikanan	Sosialisasi Pemetaan Lahan LP2B
5	Sekretariat Daerah	Fasilitasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa
6	Kecamatan Wonosobo	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas RT/RW
		Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan Serta Pelayanan Jemput Bola Langsung Ke Desa
		Fasilitasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Anak dan Perempuan
		Orientasi dan Sosialisasi Bidang Kependudukan
7	Badan Pengelolaan Pendapatan ,Keuangan Dan Aset Daerah	Sosialisasi dan Penyampaian SPPT PBB dan DHKP

## G.DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN

### Deskripsi:

Kegiatan pembangunan gedung pemerintahan merupakan kegiatan pembangunan fisik sarana prasarana gedung pemerintahan dan sarana pendukungnya .

### Pengendali belanja (*cost driver*):

Luasan per M persegi

### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

No	Harga (Rp)	Satuan	Jenis Bangunan / gedung
1	3.450.000	M2/tingkat	Harga Gedung Bertingkat Per M2 (Sederhana)
2	4.830.000	M2/tingkat	Harga Gedung Bertingkat Per M2 (Tidak Sederhana)
3	2.530.000	M2	Harga Gedung Tidak Bertingkat Per M2 (Sederhana)
4	3.680.000	M2	Harga Gedung Tidak Bertingkat Per M2 (Tidak Sederhana)
5	805.000	M	Harga Pagar Belakang / Samping Gedung Per M1 (Sederhana tinggi minimal 2 m)
6	920.000	M	Harga Pagar Belakang / Samping Gedung Per M1 (Tidak Sederhana tinggi minimal 2 m)
7	1.035.000	M	Harga Pagar Depan Gedung Per M1 (Sederhana tinggi minimal 1,5 m)
8	1.150.000	M	Harga Pagar Depan Gedung Per M1 (Tidak Sederhana tinggi minimal 1,5 m)

### Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Variabel

= Harga per satuan (m2/m) x luasan/ panjang bangunan

### Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Modal	97%	96,5%	97,5%
2	Belanja Biaya Umum	3%	2,5%	3,5%
	Jumlah		100,00%	

### Catatan :

1. Perhitungan tersebut bukan untuk bangunan gedung pemerintahan yang dianggarkan dengan mekanisme multiyears.

**Contoh Kegiatan Fasilitasi Kegiatan :**

No	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pembangunan Polsek Kaliwiro Pembangunan Polsek Kalibawang Penyempurnaan Aula Kodim Penyempurnaan Aula Kejaksaan Penataan Lingkungan Masjid Jami' Penataan Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosobo Pembangunan Perpustakaan Koramil Wonosobo Pembangunan Pagar Dan Gapura Koramil 07 Kalikajar Pembangunan Atap Polsek Watumalang Pembangunan Kantor Mwcnu Kab. Wonosobo
2	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Pembangunan Gedung Kantor Rkb Tk Dewi Ratih Dsn Lengkong Ds Binangun Watumalang Rkb Paud Mekar Sari Ds. Grugu Kaliwiro Rkb Paud Qurotul Ayun Bumen Bumirejo Mojotengah Rkb Paud Roudhotusalam Kebunsalam Tempursari Sapuran Pembangunan Gedung Tk Pertiwi Desa Bendungan Kaliwiro Pembangunan Ra Perwanida, Kalikarung, Kalibawang Rkb Tk Pertiwi Pakuncen, Selomerto Rkb Tk Aba 1 Selomerto Pembangunan Ruang Pertemuan Tk It Insan Mulia Pembangunan Gedung Tk It Al Islah Kertek Rkb Rumah Belajar Lembaga Istana Rumbia Desa Lipursari Kec. Leksono Pembangunan Gedung Tk Pgri Gondowulan Kec. Kepil Pembangunan Rkb Dan Senderan Kelompok Bermain Auliaduna Kel. Garung Kec. Garung Pembangunan Tk Dharma Wanita Kel. Kaliwiro Penyelesaian Pembangunan Tk Aisyah Sapuran (Surodento) Rehab Tk Pertiwi Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran Rehab Tk Pertiwi 2 Desa Tlogo Kec. Sukoharjo Pembangunan Rkb Tk Masyitoh Tunas Bangsa Karang Luhur Kec. Kalianget Kec. Wonosobo Pembangunan Tk Aba Tambi Kec. Kejajar

No	SKPD	Kegiatan
		Senderan Dan Pagar Tk Tunas Bangsa Binangun Watumalang
		Rkb Mi Maarif Kaliwiro Kec. Kaliwiro
		Rkb Mi Hidayatusibyan Lancar Kec. Wadaslintang
		Pembangunan Rkb Mi Al-Kayis Ash-Shaff Sambek Kec. Wonosobo
		Rkb Sd Islam Al Fatah Utama Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo
		Pembangunan Rkb Mi Maarif Nu Dusun Sirangkel Desa Mlandi Kec. Garung
		Rkb Mi Maarif Nu Pulosari Desa Campursari Kec. Kejajar
		Rkb Mi Maarif Nu Kalilembu Desa Dieng Kec. Kejajar
		Pembangunan Rkb Mi Maarif Nu Tambi Kec. Kejajar
		Rkb Mi Maarif Nu Sembungan Kec. Kejajar
		Rkb Mi Maarif Jetis, Karangsembung Kec. Kalibawang
		Penambahan Ruang Kelas Sd Negeri 10 Wonosobo
		Pembangunan Ruang Kelas Baru Sdn 1 Sindupaten Kec. Kertek
		Rkb Sdn 1 Parikesit Kec. Kejajar
		Rkb Sdn 1 Sigedang Kec. Kejajar
		Rkb Sdn 1 Tambi Kec. Kejajar
		Rkb Sdn 1 Kreo Kec. Kejajar
		Rkb Sdn 1 Gondowulan Kec. Kepil
		Pembangunan Sdn Wringinanom Kec. Kertek
		Pembangunan Rkb Sd Negeri Purbosono Kec. Kertek
		Lanjutan Pembangunan Aula/Gedung Pertemuan Smp N 1 Garung
		Rkb Smk Maarif Kejajar
		Rkb Smp Al Futuhiyah Ali Maskur Bumen Mojotengah
		Rkb Smk Pelita Al Quran Di Candiyan Kertek
		Pembangunan Sarpras Smp Ma`Arif Kalibawang
		Rkb Mts Ma'arif Kaliwiro
		Rkb Smp Nu Watumalang
		Rkb Smp Nurul Khusna Selomerto
		Rkb Smpn 1 Kertek Kec. Kertek
3	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (Pajak Rokok)
		Pembangunan Pos Kesehatan Desa
		Pembangunan Pkd Kelurahan (Pajak Rokok)
		Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Dak Fisik)

No	SKPD	Kegiatan
		Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Dan Rawat Jalan Renovasi Dan Pembangunan Gedung Puskesmas Sapuran (Bantuan Provinsi) Pembangunan Polsek Kaliwiro Pembangunan Polsek Kalibawang Penyempurnaan Aula Kodim Penyempurnaan Aula Kejaksaan Penataan Lingkungan Masjid Jami' Penataan Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosobo Pembangunan Perpustakaan Koramil Wonosobo Pembangunan Pagar Dan Gapura Koramil 07 Kalikajar Pembangunan Atap Polsek Watumalang Pembangunan Kantor Mwcnu Kab. Wonosobo
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Gedung Kantor
5	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Gedung Kantor
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
7	Sekretariat Dprd	Pembangunan Gedung Kantor
8	Kecamatan Wonosobo	Pembangunan Tpq Al'iklas Tembelang Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo Penyempurnaan Asrama Pondok Pesantren Al ' Madina Wonosobo Pembangunan Gedung Serba Guna Rw.2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo Pembangunan Perpustakaan Kampung Wonobungkah Penyempurnaan Gedung Serba Guna Rw 5 Sruni Jaraksari Wonosobo Pembangunan Gedung Serbaguna Rw 11 Jaraksari Kec. Wonosobo Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Sidojoyo Wonosobo Pembangunan Gedung Serbaguna Dan Kantor Kelurahan Mlipak ( Lanjutan ) Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Barat Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kramatan ( Lanjutan ) Penyempurnaan Gedung Pertemuan Rw 06 Griya Madukoro Asri Pembangunan Air Panas Dusun Kalianget Pembangunan Gedung Rw Setiung Sumberan Kelurahan Wonosobo Barat Penyempurnaan Pembangunan Kantor Kelurahan Jaraksari Kec Wonosobo

No	SKPD	Kegiatan
9	Kecamatan Kertek	Pembangunan Museum Tani Dusun Anggrungondok Desa Reco Kec. Kertek ( Dibangun Diatas Tanah Gg) Lanjutan Pembangunan Balai Rw 07/08 Jambusari Kel. Kertek Pembangunan Gedung Balai Rk Krakal Dawung Kel. Kertek Kec. Kertek Lanjutan Pembangunan Balai Pertemuan Kemiri-Wringinanom
10	Kecamatan Selomerto	Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Tpq Al'hidayah Bakungan Bumitirto Kec. Selomerto Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonorejo Kec. Selomerto Pembangunan Balai Rw Kampung Ngemplak Kelurahan Selomerto Kec. Selomerto Rehab Gedung Serbaguna Rt 05 Rw 08
11	Kecamatan Leksono	Pembangunan Pkbn Wonokasih Dsn Sojokerto Kec. Leksono Pembangunan Asrama Santri Ponpes Darusholihin, Dusun Kaliasem Desa Gondang Kec. Watumalang Pengecoran Untuk Pembuatan Balai Pertemuan Rt 01 Rw 06 Welahan Kec. Watumalang Pembangunan Balai Dusun Sayangan Kelurahan Wonoroto
12	Kecamatan Mojotengah	Pembangunan Madin Al Asyariyah Nurul Iman Dusun Buntu Desa Dero Duwur Mojotengah Pembangunan Asrama Putra Ponpes Al Futuhiyah Ali Masykur, Bumen Bumirejo, Mojotengah Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Limbangan Kec. Mojotengah Pembangunan Sanitasi Dan Mck Pp Al Asya'ariyah Kelibeber Kecamatan Mojotengah Rehab Pondok Pesantren Al Anwar Bumirejo Mojotengah Pembangunan Tpst Kelurahan Kalibeber Pembangunan Gedung Pertemuan Rw 10 Kelurahan Mudal Kec. Mojotengah
13	Kecamatan Garung	Senderan Dan Pengaspalan Pasar Sayur Desa Siwuran Kecamatan Garung
14	Kecamatan Kejajar	Rehab Ruang Pelayanan Paten Kec.Kejajar Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kejajar Pembuatan Pagar Keliling Kelurahan Kejajar Peningkatan Aula Dan Ruang Rapat Kantor Kecamatan Kejajar Pembangunan Tpst Desa Tieng Rw 02 Peningkatan Klinik Pratama Rawat Inap Mabarrot Nu Tieng

No	SKPD	Kegiatan
		Pembuatan Posko Bencana Dan Sarana Penunjang Siaga Bencana Lainnya
15	Kecamatan Sapuran	Pembangunan Rumah Dinas / Jabatan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Sapuran (Lanjutan)
16	Kecamatan Kaliwiro	Pembangunan Gor Indor Kelurahan Kaliwiro Kec. Kaliwiro
17	Kecamatan Wadaslintang	Lanjutan Pembangunan Balai Kelurahan Wadaslintang
18	Kecamatan Kalibawang	Pembangunan Pos Jaga Dan Gedung Kelembagaan

## H.DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN JALAN

### Deskripsi:

Kegiatan pembangunan jalan merupakan kegiatan pembangunan jalan beserta bangunan pendukung jalan yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.

### Pengendali belanja (*cost driver*):

Luasan per M persegi

### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

No	Harga (Rp)	Jenis Bangunan / gedung	Satuan
<b>1</b>		<b>Lapen sheet</b>	
	86.086	Lapisan penetrasi tebal 5 cm	m <sup>2</sup>
	77.142	Lapis sand sheet tebal 2 cm jadi	m <sup>2</sup>
<b>2</b>		<b>Hotmix 1 lapis tipe 1</b>	
	1.586	Lapis perekat - Aspal emulsi	m <sup>2</sup>
	135.238	Laston lapis aus perata (HRS-WC(L)) tebal 4 cm	m <sup>2</sup>
<b>3</b>		<b>Hotmix 1 lapis tipe 2</b>	
	1.586	Lapis perekat - Aspal emulsi	m <sup>2</sup>
	122.775	Laston lapis aus perata (AC-WC(L))tebal 4 cm	m <sup>2</sup>
<b>4</b>		<b>Hotmix 2 lapis tipe 1</b>	
	58.653	Lapis pondasi agregat kelas A tebal 12.5 cm	m <sup>2</sup>
	3.698	Lapis resap pengikat - Aspal emulsi	m <sup>2</sup>
	180.843	Laston lapis antara perata (AC-BC(L)) tebal 6 cm	m <sup>2</sup>
	1.586	Lapis perekat - Aspal emulsi	m <sup>2</sup>
	101.428	Laston lapis aus (HRS-WC) tebal 3 cm	m <sup>2</sup>
<b>5</b>		<b>Hotmix 2 lapis tpe 2</b>	
	58.653	Lapis pondasi agregat kelas A tebal 12.5 cm	m <sup>2</sup>
	3.698	Lapis resap pengikat - Aspal emulsi	m <sup>2</sup>
	180.843	Laston lapis antara perata (AC-BC(L)) tebal 6 cm	m <sup>2</sup>
	1.586	Lapis perekat - Aspal emulsi	m <sup>2</sup>
	122.775	Laston lapis aus (AC-WC) tebal 4 cm	m <sup>2</sup>
<b>6</b>	95.418	<b>Rolak Telasah dengan Pasir Urug</b>	m <sup>2</sup>
<b>7</b>		<b>Pekerjaan drainase</b>	
	51.512	Galian untuk Selokan Drainase	m <sup>3</sup>
	730.307	Pasangan Batu dengan Mortar	m <sup>3</sup>

No	Harga (Rp)	Jenis Bangunan / gedung	Satuan
<b>8</b>		<b>Pekerjaan Beton</b>	
	1.542.301	Beton mutu sedang $f_c'=30$ MPa Untuk Jalan	m <sup>3</sup>
	13.695	Baja Tulangan U 24 Polos	kg
<b>9</b>		<b>Pekerjaan Sederan</b>	
	42.998	Galian tanah	m <sup>3</sup>
	668.009	Pas. Batu kali 1 : 6	m <sup>3</sup>
	48.000	Plesteran 1 : 3	m <sup>2</sup>
	43.042	Siaran 1 : 2	m <sup>2</sup>

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Variabel

= Harga per satuan (m<sup>2</sup>/m) x luasan bangunan jalan

**Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja :**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Modal	97%	96,5%	97,5%
2	Belanja Biaya Umum	3%	2,5%	3,5%
	Jumlah		100,00%	

**Catatan :**

1. Perhitungan tersebut untuk pembangunan jalan dalam kondisi standar yang sudah siap bangun, belum termasuk untuk kebutuhan bangunan atau sarana pendukung jalan lainnya.

**Contoh Kegiatan Fasilitasi Kegiatan :**

No	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Rake Panangkarau
		Peningkatan Jalan Dan Jembatan
		Peningkatan Ruas Jalan Ropoh - Pulosaren Banyumudal Kec. Kepil
		Pembangunan Jalan Tanjungsari-Banyumudal Kec.Sapuran
		Peningkatan Jalan Rakai Watuhumalang (Sikunang-Mutisari) Kec.Kejajar
		Pembangunan Jalan Selokromo - Kaliputih
		Pembangunan Jalan Kedalon - Banyumudal
		Pembangunan Jalan Kyuni - Tempurejo Sapuran
		Aspal Jalan Pucung Kel.Leksono Kec.Leksono
		Aspal Jalan Durensawit Mangis Kec.Leksono
		Aspal Jalan Krasak Durensawit Kec.Leksono
		Aspal Jalan Tegalsari - Mlandi Kec.Garung
		Aspal Jalan Jlamprang Sirebut Kelurahan Leksono Kec. Leksono
		Rehab Jembatan Dan Jalan Ruas Jalan Trajon Kec. Kertek
		Peningkatan Jalan Lamuk Kwadungan Kec. Kalikajar
		Peningkatan Jalan Kalieber - Slukatan
Penataan Lingkungan Rt.06/05 Kp. Kepatihan Kec. Leksono		

No	SKPD	Kegiatan
		Betonisasi Kp.Tengah Leksono
		Betonisasi Dan Senderan Rw 2 Sarimulyo Tawang Sari
		Aspal Jalan Kuripan - Wonokerto
		Pembangunan Jalan Bendosari - Tempursari Kecamatan Sapuran
		Pembangunan Jalan Tanjungsari - Ngadisalam Kecamatan Sapuran
		Peningkatan Jalan Tambi - Rejosari Kec. Kejajar
		Pembangunan Senderan Rw.01 Sukoyoso Menuju Perumahan ASRI Permai
		Pembangunan Senderan Dan Drainase Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Wonosobo
		Pembangunan Senderan Dan Drainase Jalan Letda Soedarmono
		Pembangunan Senderan Dan Drainase Jalan Lamuk-Bowongso
		Senderan Jalan Mlandi Dadapan Kecamatan Garung
		Senderan Jalan Rt.5/8 Dan Pembangunan Jalan Rt.1 Kemiri Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo
		Senderan Dan Rolak Jalan Desa Wonosari Kec. Mojotengah
		Senderan Jalan Lamuk Wonosari Kec. Kalikajar
		Senderan Jala Mutisari Binangun Kec. Watumalang
		Senderan Tembelang (Sigerok) Wonosari Kec. Wonosobo
		Senderan Jalan Kwadungan Banyumudal Kalikajar
		Senderan Kampung Nirmalasari Rt 8/4 Stasiun Kec. Wonosobo
2	Kecamatan Wonosobo	Pembangunan Senderan Jalan Tlogowero - Sumberjati Kecamatan Wonosobo
		Senderan Jalan Windusari Desa Tlojojati-Trenggiling Desa Sariyasa Kec. Wonosobo
		Pembangunan Aspal Jalan Tembelang - Pagude Kec. Wonosobo
		Pembangunan Senderan RT.03/01 Kalianget, Kelurahan Kaoianget Kecamatan Wonosobo
		Pembangunan Aspal Jalan RW.11 Perum Argopeni Indah Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo
		Pembangunan Aspal Jalan RW.14 Depan Masjid Al Mansur, Kauman Utara, Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo
		Betonisasi Dan Senderan Jalan RT.02 RW.09 Bugangan Kelurahan Kalianget Kecamatanwonosobo
		Pembangunan Senderan Dan Betonisasi RT.05/07 Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo

No	SKPD	Kegiatan
		Senderan Jalan RT.1 RW.2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo
		Senderan Dan Betonisasi Sentral Menuju Ketinggring Kecamatan Wonosobo
		Pembangunan Senderan RT.5 RW.6 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo
		Pembangunan Senderan Jalan Kampung Mangkli Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo
		Pembangunan Senderan RT 7 RW 2 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo
		Senderan Lingkungan RT 05 RW 01 Kampung Asri Mulyo Mlipak Kec. Wonosobo
		Pavingisasi Dan Senderan RT 3 RW 6 Griya Madukara Asri Kel. Bumireso Kec. Wonosobo
		Senderan Jalan RT 02 RW 08 Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo
		Perbaikan Jalan Dan Saluran RW 1 RT 8 Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo
		Peningkatan Jalan Mirombo Permai Rt 01 Rw 06 Kel Rojoimo
		Pembangunan Senderan Dan Jembatan Mulyo Joyo Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo
		Pembangunan Dan Betonisasi Dan Senderan Jalan Kampung Taraja Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo
		Pembangunan Betonisasi Dan Senderan Jalan Rt 02/08 Kampung Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo
		Pembangunan Dan Senderan Jalan Wonosari Pagude Kec. Wonosobo
		Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 10 Prajurit Bawah ( Lanjutan )
		Senderan Sukoyoso (Lanjutan )
		Pembangunan Senderan RT 13 Kampung Ngedok
		Senderan Jalan Kejiwan Menuju Kalibeber
		Aspal Jalan RT 03 RW 03 Kelurahan Mlipak ( Lanjutan )
		Betonisasi Dan Senderan Jalan Madukoro Ke Rojoimo ( Lanjutan )
		Pembangunan Senderan Pengaman Badan Jalan Kelurahan Jaraksari Ke Desa Wonolelo RT 09 RW 02 ( Lanjutan )
		Pembangunan Pembatas Jalan, Senderan, Drainase Dan Gorong2 RT 01 RW 01
		Betonisasi Dan Senderan RT 02 RW 04 Kampung Bugangan
		Pekerjaan Pavingisasi Dan Drainase RT 7 RW 6 Jlegong
		Penataan Kawasan Pemukiman Kp. Sruni Kel. Jaraksari
		Pembangunan Senderan Kampung Argopeni RT 2 RW 8 Kel Kalianget Kec. Wonosobo

No	SKPD	Kegiatan
		Penataan Lingkungan Jlegong Pagerkukuh Kec. Wonosobo Pembangunan Senderan Penahan Longsor Kelurahan Sambek Pembangunan Rabat Beton Dan Senderan Kp.Kasiran RT.03 RW.07 Kel.Mlipak Lanjutan Rabat Beton Dan SPAL RT.3 RW.1 Kel.Tawang Sari Pembangunan Senderan Dusun Sambek - Jolontoro Pembangunan Senderan Pemukiman Rawan Longsor Kel.Sambek Pembangunan Senderan Makam Mainan Kel.Wonosobo Barat Pembangunan Senderan Sukoyoso RT.0 RW.0 Dan RT.02 RW.05 Kel.Kramatan Pembangunan Senderan RW.3 Kel.Wonosobo Barat Pembangunan Drainase Dan Pavingisasi Jalan Lingkungan RW.03 Kenteng Kel.Kejiwan Penataan Jalan Lingkungan Dan Jalan Madrasah Kampung Sarwodadi Kel Tawang Sari
3	Kecamatan Kertek	Aspal Jalan Candimulyo - Kapencar Kec. Kertek Pembangunan Senderan Jalan Candimulyo Ke Kapencar Purbosono Kec. Kertek Lanjutan Drainase Ruas Jalan Penanggulangan Bejiarum-Kedewan Lanjutan Aspal Kedewan-Penanggulangan Bejiarum Aspal Jalan Dusun Butuh Desa Ngadikusuman Senderan Jalan Dusun Wringin Desa Tlogodalem Senderan Dan Drainase Banjar Gedemenuju Banjarsari Desa Banjar Senderan Drainase Kusuma Baru - Butuh Ngadikusuman Lanjutan Senderan Drainase Bejjurang - Butuh Ngadikusuman Senderan Jalan Banjarsari Desa Banjar Menuju Damarkasih Lanjutan Betonisasi Jalan Ekonomi Pagerejo-Purwojati Aspal Jalan Sindupaten Kecamatan Kertek Senderan Jalan Kabupaten (Binangun - Damarkasiyan) Penataan Lingkungan Gletosari Kelurahan Kertek Penataan Lingkungan Kel. Kertek Sarpras Lingkungan Kel.Wringinanom Lanjutan Betonisasi Jalan Jambusari Kel Kertek-Kersan Bojasari Senderan Dan Rolak Jalan Kenjer Kecamatan Kertek

No	SKPD	Kegiatan
		Pembangunan Senderan Jalan Kampung Campursari Rw 0 Kel. Kertek Menuju Kliwonan Rehab Aspal Ruas Jalan Sayangan - Ngadimulyo Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek ( Kenjer - Kliwonan ) Pembangunan Jalan Alternatif Jambusari - Kersan Peningkatan Jalan Purwojati - Tlogomulyo
4	Kecamatan Selomerto	Penataan Jalan Lingkungan Kel. Selomerto Kec. Selomerto Senderan Jalan Karangobar ( Kecis ) Menuju Krasak Betonisasi Dan Drainase RW 04 Dusun Ngampel Betonisasi RT 3 RW 8 Kel. Selomerto Kec. Selomerto Aspal Jalan Balekambang - Karangrejo Penataan Kawasan Pemukiman Kel. Selomerto Pembangunan Senderan Jalan Desa Simbarejo-Desa Bumitirto Pengaspalan Jalan Tembus Leksono RW 8 Kelurahan Selomerto (Depan Kantor Kelurahan) Betonisasi Dusun Ngemplak Kel.Selomerto Perbaikan Jalan Lingkungan Dan Drainase Dusun Losari RW.0 Plat Beton Jalan Soeharto Kelurahan Selomerto Pembangunan Betonisasi Kccis - Ndiwek Kec. Selomerto
5	Kecamatan Leksono	Aspal Jalan Pacarmulyo - Limbangan Blok Braol Kec. Leksono Pembangunan Rabat Beton Kelurahan Leksono Blok Kaliwaru Rw Kec. Leksono Pembangunan Senderan Jalan Utama Timbang Menuju Pacarmulya Kec. Leksono Pembangunan Senderan Jalan Utama Jonggolsari Blok Talonombo Kec. Leksono Rehab Aspal Dan Drainase Jalan Dari Cumbring Kec. Selomerto Menuju Desa Lipursari Kec. Leksono Pembangunan Jalan Dari Desa Lipursari Kec. Leksono Menuju Desa Mirombo Kec. Kaliwiro Drainase Manggis Duren Sawit Kec Leksono Aspal Jalan Limbangan Mbesani Kec. Leksono Senderan Jalan Blok Wonokasih Ruas Jalan Mboto Pacarmulyo Kec. Leksono Peningkatan Jalan Pongok Ruas Jalan Pacarmulyo-Krasak Kec. Leksono Senderan Jalan Mboto Menuju Selokromo Kec. Leksono Senderan Jalan Jonggolsari Ruas Jalan Leksono Kouripan Kec. Leksono

No	SKPD	Kegiatan
		Peningkatan Jalan Kalimendong-Tlogo Kec. Leksono Aspal Jalan Manggis Tlogo Kec. Leksono Drainase Jalan Besani -Krasak, Ruas Jalan Besani Senderan Jalan Lipursari - Kaliwiro Pengaspalan Jalan Leksono Pucung Peningkatan Sarana Jalan Selokromo - Lipursari Blok Kropokan Peningkatan Jalan Timbang Pacarmulyo - Limbangan Blok Duren Sawit Peningkatan Jalan Krasak - Durensawit Senderan Dan Drainase Jalan Leksono Pucung Peningkatan Jalan,Senderan Ruas Jalan Limbangan Pacarmulyo
6	Kecamatan Watumalang	Senderan Dan Drainase Ruas Jalan Kuripan - Binangun Di Dusun Banjaran Desa Kuripan Kec. Watumalang Peningkatan Jalan Pasuruhan - Banyukembar Kec. Watumalang Pembangunan Senderan Jalan Binangun Wonosroyo Kec. Watumalang Pembangunan Drainase Jalan Utama Desa Gondang Kec. Watumalang Menuju Pacarmulyo Pembagunan Senderan Desa Lumajang Kec. Watumalang Blok Salam Menuju Mojosari Pembangunan Jalan Gumawang Krinjing Menuju Wonokampir Kec. Watumalang Pembangunan Senderan Jalan Pagedangan Menuju Mutisari Kec. Watumalang Aspal Jalan Klesem Atas Kelurahan Wonoroto Kec. Watumalang Peningkatan Jalan Aspal Sumbersari Binangun Wonosroyo Kecamatan Watumalang Senderan Jalan Ruas Jalan Gondang Kuripan Di Limbangan Aspal Jalan Klesem Atas Kelurahan Wonoroto Ruas Jalan Kuripan Banyukembar ( Lanjutan ) Rehab Aspal Ruas Jalan Tembus Wonoroto - Batas Desa Lumajang Rehab Aspal Jalan Krinjing Gentan ( 74 ) Rehab Aspal Ruas Jalan Pasuruan - Banyukembar Aspal Jalan Mutisari Kalidesel Kecamatan Watumalang Aspal Jalan Kuripan Binangun Kecamatan Watumalang Senderan Dan Drainase Jalan Mutisari-Dieng Di Dusun Bendungan Desa Mutisari Kecamatan Watumalang

No	SKPD	Kegiatan
7	Kecamatan Mojotengah	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.Rw.5 Manggisari Kelurahan Mudal, Mojotengah Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Karang Sari Kelurahan Andongsili, Mojotengah Pembangunan Senderan Dan Betonisasi Jalan Lingkungan Rw 3 Kelurahan Kalibeber Kec. Mojotengah Pembangunan Senderan Dan Betonisasi Jalan Lingkungan RW 9 Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah Pembangunan Betonisasi Jalan Lingkungan Panggrungan Kel Andongsili Kec. Mojotengah Peningkatan Jalan Bumiroso Menuju Sukorejo Di Larangan Kulon, Mojotengah Senderan Dan Peningkatan Jalan Dusun Bismo Desa Silandak Kecamatan Mojotengah Pembangunan Jalan Kleyang Jurang Desa Pungangan Kec. Mojotengah Peningkatan Jalan Sojopuro -Candirejo Kec. Mojotengah Peningkatan Jalan Keseneng-Tosobo Candirejo Kec. Mojotengah Pembangunan Senderan Dan Saluran Ruas Jalan Gondang-Pungangan Di Pagewol Kleyang Kec. Mojotengah Pembangunan Dan Saluran Ruas Jalan Kalibeber-Dero Di Dero Ngisor Kec. Mojotengah Pembangunan Senderan Dan Betonisasi Binangun -Limbangan Kec. Mojotengah Penataan Lingkungan MI Manggisari Kec. Mojotengah Pembangunan Drainase Jalan Candirejo Mojotengah Betonisasi Dan Senderan Jalan Lingkungan Dsn Bugel Desa Keseneng Kec Mojotengah (Lanjutan..) Pembangunan Aspal Jalan Petir-Pungangan Kec. Mojotengah Pavingisasi Dan Drainase RW 3 Pandansari Kel.Mudal Kec.Mojotengah Pembangunan Trotoar Jalan Jawar - Kalibeber Perbaikan Saluran Air Jalan Kalibeber - Jawar RW 3 Kel.Kalibeber Senderan Jalan Petir - Wanayasa Kec.Mojotengah Pembangunan Senderan Jalan Mojosari - Gondang Dilumiring Mojosari Mojotengah Lanjutan Aspal Jalan Candirejo - Wonosari Pembangunan Jalan Lingkar Kalibeber Rehab Aspal Jalan Dusun Wonokromo Desa Wonokromo
8	Kecamatan Garung	Aspal Ruas Jalan Sitiharjo Menuju Tegalsari Di Dusun Topengan Sitiharjo Kecamatan Garung

No	SKPD	Kegiatan
		Senderan Dan Peningkatan Jalan Larangan Lor Desa Larangan Lor Kecamatan Garung
		Penataan Lingkungan Dusun Boralan Kec. Garung
		Senderan Pengaman Jalan Dan Jembatan Desa Lengkong Kec. Garung
		Perbaikan Jalan Dusun Boralan Ke Kelurahan Garung Kec. Garung
		Rehab Jalan Lengkong-Kayugiyang Kec. Garung
		Rehab Jalan Dan Senderan Gemblengan Kayugiyang Kec. Garung
		Pembangunan Senderan Dan Saluran Ruas Jalan Menjer - Laranganlor Di Dusun Menjer Kecamatan Garung
		Pembangunan Betonisasi RT 5 RW Desa Maron Garung Kec. Garung
		Pembangunan Senderan Dan Betonisasi Mlandi-Larangan Kecamatan Garung
		Pembangunan Aspal Jalan Kuripan-Kayugiyang Kec Garung
		Senderan Jalan Bedilon - Kasiman
		Peningkatan Jalan Gemblengan - Bumirejo
		Senderan Jalan Dusun Laranganlor Di RT 3 RW Desa Laranganlor Kec.Garung
		Peninggian Jalan Pertigaan Penampelan Ke Desa Sitiharjo Kec. Garung
		Lanjutan Pembangunan Trotoar Jalan Dieng Desa Jengkol Kec. Garung
		Pembangunan Trotoar RW Kelurahan Garung Kecamatan Garung
9	Kecamatan Kejajar	Betonisasi Jalan Masuk Desa Buntu Kec. Kejajar
		Lanjutan Pembangunan Drainase Dan Trotoar Depan SMP Ke Arah Utara
		Rehabilitasi Jalan ,Pagar Dan Gorong-Gorong RT.0RW.0 Purwosari Kel.Kejajar
10	Kecamatan Kalikajar	Senderan Dan Drainase Jalan Mangunrejo Kec. Kalikajar
		Senderan Jalan Lamuk- Kwadungan Di Dusun Lamuk Kec. Kalikajar
		Peningkatan Jalan Mungkung-Karanganyar
		Peningkatan Jalan Kewengen - Ngadisalam Kec. Kalikajar
		Peningkatan Jalan Butuh Kidul-Bowongso
		Aspal Jalan Purwojiwo-Kwadungan Kec Kalikajar
		Pemeliharaan Jalan Pringapus - Kembaran
		Senderan Jalan PU Sadan-Bowongso Kalikajar
		Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bowongso-Bakalan
		Penataan Lingkungan Serang Kelurahan Kalikajar

No	SKPD	Kegiatan
		Penataan Lingkungan Ngadiwongso Kelurahan Kalikajar
		Penataan Lingkungan Kampung Kalikajar
		Penataan Lingkungan Gandok Kelurahan Kalikajar
		Lanjutan Penataan Kawasan Lingkungan Kel. Kalikajar - Wonosobo (Peningkatan Jalan Blok Kp. Ngasinan Kidul)
		Aspal Jalan SMPN 4 Purwojiwo Menuju Simbang Kalikajar
		Peningkatan Jalan Kabupaten Sadan - Butuh Kidul Kalikajar
		Senderan Jalan Kabupaten Sadan - Bowongso Di Dusun Nguwok Kec. Kalikajar
		Senderan Jalan Mangunrejo - Cledok
		Peningkatan Jalan Gandok - Kewengen
		Peningkatan Jalan Pencil - Kalikuning
		Aspal Jalan Desa Klowoh Kwadungan Kecamatan Kalikajar
		Aspal Jalan Desa Perboto - Desa Kedalon Kecamatan Kalikajar
		Senderan Jalan Desa Kalikuning - Desa Wonosari Kecamatan Kalikajar
		Senderan Jalan Dusun Jengeran Desa Butuh Kidul - Desa Bowongso
		Senderan Jalan Desa Wonosari - Kalikuning
		Aspal Jalan Simbang - Kalikuning
		Senderan Jalan Kwadungan - Kembaran
11	Kecamatan Sapuran	Senderan Dan Drainase Jalan Sekroyo Dusun Kertek Desa Batusari Kec. Sapuran
		Senderan Jalan Karangsambung Ke Kuncen Desa Batsari Kec. Sapuran
		Aspal Jalan Banyumudal - Kandangan - Ngadikerso Kec. Sapuran
		Peningkatan Jalan Tempursari Menuju Desa Batusari Kec. Sapuran
		Aspal Jalan Tempursari Kuncen - Batusari Kec. Sapuran ( 45 )
		Senderan Jalan Sipedet - Karangjinem Kec. Sapuran ( 39 )
		Betonisasi Jalan Antar Desa Banyumudal- Pulosaren Di Dusun Sumber Desa Rimpak Kec. Sapuran ( 4)
		Senderan Jalan Antar Desa Karang Sari - Kalikarung Di Dusun Garungan Desa Karang Sari Kec. Sapuran (R.35)
		Senderan Jalan Sapuran - Ngadikerso Di Dusun Limbangan Desa Tempursari Kec. Sapuran (R.45)
		Peningkatan Jalan Ngadisalam Kwadungan Kec. Sapuran ( 44 )

No	SKPD	Kegiatan
		Peningkatan Jalan Kalikarung-Karang Sari Kec. Sapuran ( 35 ) Aspal Jalan Ngadikerso - Rimpak Di Dusun Pencongan Desa Rimpak Kec. Sapuran ( 38 ) Betonisasi Dan Senderan Jalan Glagah Menuju Talunombo Kec Sapuran (Lanjutan..) ( 43 ) Betonisasi Jalan Bakalan Wetan Kelurahan Sapuran Kec. Sapuran Penataan Jalan Lingkungan Kampung Surodento Kelurahan Sapuran Kec. Sapuran Aspal Jalan Talunombo Menuju Desa Tempursari Kec. Sapuran ( 39 )
12	Kecamatan Kepil	.Aspal Ruas Jalan Jangkrikan - Kalikarung Senderan Jalan Di Sijongkeng ,Tegeswetan Kepil Betonisasi Jalan Mendongan - Gepengan, Gondowulan, Kepil Senderan Jalan Gadingrejo - Kagungan Di Sigaeng RT.0RW.Kepil Betonisasi Jalan Mojosingi RT.0 RW.0 Kepil Betonisasi, Senderan Dan Gorong-Gorong Jalan Antar Desa Gondowulan-Kalikarung Di Dusun Sambo-Ungaran Desa Gondowulan Kec. Kepil Aspal Jalan Antar Desa Di Dusun Kemejing Kecamatan Kepil Lanjutan Aspal Jalan Dusun Gamblok Desa Gadingrejo Kec. Kepil Aspal Jalan Dusun Penthengan Kelurahan Kepil Aspal Jalan Gadingsukuh - Tegeswetan Kec. Kepil (Lanjutan...) Aspal Jalan Gondowulan Kepil Menuju Kalikarung Kalibawang Aspal Jalan Kaliwuluh - Ropoh Kecamatan Kepil Aspal Jalan Warangan - Ropoh Kec. Kepil (Lanjutan) 4.Pembangunan Talud Jalan Ropoh- Pulosaren Kec Kepil Menuju Banyumudal Kec Sapuran Aspal Jalan Sarwodadi Gadingrejo Menuju Rejosari Kecamatan Kepil Aspal Jalan Sewiyu Kel. Kec. Kepil Pembangunan Senderan Jalan Kapulogo Menuju Kaliwuluh Kec. Kepil Pembangunan Jalan Kagungan - Gadingrejo Pembangunan Jalan Aspal Tegalgot - Kaliwuluh Pembangunan Jalan Beran - Rimpak
13	Kecamatan Kaliwiro	Aspal Jalan Ngadisono - Lebak Via Bodoran Aspal Jalan Dusun Jatiwero Kelurahan Kaliwiro Beton Jalan Kaliguwo (Parakandawa/Jembatan - Gunung Watu) Ke Desa Ngasinan, Kaliwiro Aspal Jalan Dusun Wilahan Desa Ciledok, Kaliwiro

No	SKPD	Kegiatan
		Lanjutan Aspal Jalan Sedelan Kel. Kaliwiro Ke Pencil Medono Kec. Kaliwiro
		Aspal Jalan Wonoroto Tracap Ke Citralangu Desa Grugu Kec. Kaliwiro
		Lanjutan Aspal Jalan Tanjunganom Ke Grugu Kec. Kaliwiro
		Aspal Jalan Dan Senderan Bonegoro Ke Makam Menuju Desa Selomanik Kec. Kaliwiro
		Pembangunan Drainase Jalan Kaliwiro-Kalibawang ( Dusun Gumiwang )
		Aspal Jalan Lamuk - Kaliguwo ( Ladan )
		Aspal Jalan Lamuk- Banjarnegara, Kec. Kaliwiro
		Aspal Jalan Lamuk Pesodongan Kec. Kaliwiro
		Lanjutan Pengaspalan Dan Perbaikan Jalan Dari Dusun Kouripan Gendotan Desa Winongsari Menuju Dusun Sukoreno Desa Sukoreno Kec. Kaliwiro
		Senderan Jalan Dusun Temanggung Desa Winongsari Kecamatan Kaliwiro Pada Jalan Kouripan Desa Winongsari Menuju Ke Desa Kalialang Kecamatan Kalibawang
		Aspal Jalan Purwosari Gambaran Kecamatan Kaliwiro
		Aspal Jalan Ngadisono Payadan Kec. Kaliwiro
		Aspal Jalan Desa Kemiriombo Kec. Kaliwiro Ke Desa Lipur Sari Kec. Leksono
		Betonisasi Jalan Desa Tanjunganom Patokan Menuju Gambaran Kecamatan Kaliwiro
14	Kecamatan Wadaslintang	Rabat Beton Jalan Rt 6 - 7 Dusun Sabrang Wetan Desa Lancar Kec. Wadaslintang Pembangunan Betonisasi Kalidadap Ke Watuurip Batas Kab Kebumen Kec. Kaliwiro Aspal Jalan Dusun Paras Kelurahan Wadaslintang Senderan Dan Betonisasi Dusun Cangkring RT.06 RW.07 Kelurahan Wadaslintang Aspal Jalan Kalisat-Plunjaran Kec. Wadaslintang Lanjutan Aspal Jalan Sodong-Kalidadap Kec. Wadaslintang Aspal Jalan Sipait Besuki - Penerusan Kec. Wadaslintang Senderan Dusun Cangkring Menuju Dusun Kemutug Desa Tirip Kec. Wadaslintang Lanjutan Perbaikan Pengaspalan Jalan Dari Dusun Blawong Desa Ngalian Menuju Ke Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang Betonisasi Jalan Dalam Kampung Dusun Wadaslintang RT ORW 0 Kelurahan Wadaslintang Aspal Jalan RT 01,0,04 RW 07 RT 05 RW 09 Kel.Wadaslintang Aspal Jalan Gondang Tritis

No	SKPD	Kegiatan
		Betonisasi Jalan Lingkar Wadaslintang - Dadappede Aspal Jalan Penerusan Kecamatan Wadaslintang Menuju Pamrihan Kabupaten Purworejo Aspal Jalan Dusun Kalisalak - Dusun Kaligowong Desa Kaligowong Kec. Wadaslintang Aspal Jalan Sikapat Besuki Menuju Karanggedang Bruno Kab. Purworejo Pembangunan Aspal Jalan Gedongan Ngalihan Kec. Wadaslintang Aspal Jalan Desa Plunjaran Ke Desa Kumejing Wadaslintang Aspal Jalan Nggondangan RT.Gumelar, Wadaslintang
15	Kecamatan Sukoharjo	Drainase Jalan Sukoharjo - Wonosroyo Di Suroyudan Aspal Jalan Gunung Tugel - Pulus Kec. Sukoharjo Aspal Jalan Prumasan Kalibening - Garunglor Kec. Sukoharjo Pembangunan Jalan Antar Desa Dari Desa Gunung Tugel Menuju Dusun Kewali Desa Pulus Kec. Sukoharjo Peningkatan Jalan Rejosari-Kupangan Kec. Sukoharjo Pelebaran Jalan Sukoharjo Kec. Sukoharjo Aspal Jalan Mbobos-Plodongan Kec. Sukoharjo Pembangunan Senderan Desa Suroyudan Garung Lor Kec. Sukoharjo Lanjutan Aspal Jalan Pulus - Tlogo Kec. Sukoharjo Peningkatan Jalan Tlogo - Kalimendong Aspal Jalan Desa Garunglor Dukuh Kandangan Desa Gumiwang Sukoharjo Senderan Jalan Desa Kupangan - Desa Mergosari Sukoharjo Aspal Jalan Blungkang Desa Tlogo Kec. Sukoharjo Menuju Kalimendong Leksono Pembangunan Senderan Jalan Desa Kalibening Menuju Wonosroyo
16	Kecamatan Kalibawang	Aspal Jalan Desa Tempurejo Ke Desa Bogoran Kalibawang Senderan Dan Drainase Jalan Dempel Gandawulan Menuju Desa Mergolangu Kalibawang Aspal Jalan Sijabung, Pengarengan, Kalibawang Sanitasi Jalan Depok, Kalibawang Aspal Jalan Lanjutan Pulepandak, Kalikarung - Gondowulan, Kalibawang Drainase Jalan Dan Plat Beton Jalan Dusun Semanding Desa Depok

<b>No</b>	<b>SKPD</b>	<b>Kegiatan</b>
		Pembangunan Aspal Jalan Kalikarung-Jangkrikan Kec. Kalibawang
		Aspal Jalan Menuju Tempurejo Kecamatan Kalibawang
		Peningkatan Jalan Karangsembung-Mangunrejo
		Senderan Jalan Tambimalang Desa Depok
		Aspal Jalan Desa Dempel Menuju Desa Pengarengan
		Peningkatan Jalan Kalialang - Winongsari
		Aspal Jalan Pucungroto Kemiriombo Kecamatan Kalibawang
		Peningkatan Jalan Gedongan Desa Tempurejo

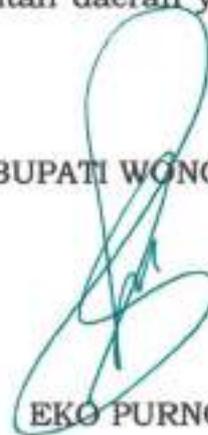
## BAB IV

### PENUTUP

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam proses penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ASB digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran, sehingga program kegiatan yang di usulkan SKPD sudah benar-benar sesuai dengan tupoksi, dan mendasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas serta meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi dalam satu tahun anggaran.

Pada akhirnya dengan disusunnya Peraturan Bupati Wonosobo tentang Analisis Standar Belanja yang merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam penyusunan anggaran daerah dengan pendekatan kinerja dapat berguna untuk pengendalian belanja pemerintah daerah yang dapat lebih mengefisienkan anggaran pemerintah daerah .

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO